

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abubakar, Ali dan Zulkamain Lubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana.

Ali, Chaidir. 1976. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Fajar Interpretama Mandiri: Jakarta

Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Hiariej, Eddy O.S. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Cangkang Education.

Kansil, C.S.T. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka.

Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksklusif Bagian Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Pangaribuan, Aristo M.A *et al.* 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Safudin, Endrik. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jawa Timur: Setara Press.

Sasangka, Hari. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Sasangka, Hari dan Tjuk Suharjanto. 1988. *Penuntutan dan Teknik Pembuatan Surat Dakwaan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Sitompul, Josua. 2021. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.

Michelle Rezky, 2022

**BENTUK DAKWAAN IDEAL PADA KASUS TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK
BERBENTUK AKUN PALSU DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Utrecht, Ernst. 1968. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Erleni. 2016. "Menyisir Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Melakukan Transaksi Jual-Beli melalui Internet dan Upaya Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli melalui Internet". *Disiplin* Vol. 22 No. 09- Juni 2016.

Keintjem, Fioren Alesandro *et al.* 2021. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.

Markustianto, Deas dan Budi Setiyanto. 2019. "Tindak Pidana Pembuatan Akun Palsu dalam Media Sosial atas Nama Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013.PN.PT)". *Recidive* Volume 8 No. 1 Januari-April 2019.

Nazir. 2015. "Tinjauan Yuridis tentang Delik Berlanjut dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015.

Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. 2018. "Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum". *Justitia Jurnal Hukum* Volume 2 No.1 April 2018.

Rahadi, Dedi Rianto. "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 5, Nomor 1, 2017.

Samadi, Yessy Paramita. 2015. "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen* Vol. IV/No.2/April/2015.

Septiana, Dian Ayu Victoria dan Dwi Saputro. 2016. "Tinjauan tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidi oleh Penuntut Umum dan Metode Pembuktiannya (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby)". *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 1, 2016.

Internet

Michelle Rezky, 2022
**BENTUK DAKWAAN IDEAL PADA KASUS TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK
BERBENTUK AKUN PALSU DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

Kurnia, Abi Jam'an. 2019. *Hukumnya Membuat Fake Account di Media Sosial*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cbfeef123453/hukumnya-membuat-ifake-account-i-di-media-sosial/>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. http://adams.co.id/rule/UU/ITE/bab_02.htm, diakses pada tanggal 8 Desember 2021.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Manipulasi*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online/Daring. <https://kbbi.web.id/manipulasi> diakses pada tanggal 26 November 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Orang*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online/Daring. <https://kbbi.web.id/orang> diakses pada tanggal 15 November 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Penciptaan*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online/Daring, <https://kbbi.web.id/cipta>, diakses pada tanggal 27 November 2021.

Viswandro. 2014. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

Karya Ilmiah

Suwarnatha, I Nyoman Ngurah. 2019. *Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Penipuan dalam Transaksi Elektronik*. Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Skripsi

Dini, Ganawati Candra. 2008. *Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Kombinasi oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Nababan, Penita Azriani. 2020. *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan melalui Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 503/PID.SUS/2018/PN JMB)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Michelle Rezky, 2022

BENTUK DAKWAAN IDEAL PADA KASUS TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK BERBENTUK AKUN PALSU DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*. (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang *Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Nomor: 3062/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 311/Pid.B/2020/PN Tbt.

Jaksa Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 004/J.A/11/1993 tentang *Pembuatan Surat Dakwaan*.